

PEMBERDAYAAN DAN KESEMPATAN KERJA¹

Oleh : Asep Sumaryana²

Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban (DP) di Jawa Barat dengan dana seratus miliar untuk 100 desa yang dibagi rata bisa mempercepat pembangunan desa. Asal saja pembangunan tersebut tidak merusak kehidupan desa dalam jangka panjang. Untuk itu kehadiran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jabar perlu ditempatkan pada upaya tersebut dengan penyusunan juknis serta melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi sebagai tim pendamping (PR,3/5/10).

Dengan program diatas, kemiskinan dan kesempatan kerja di pedesaan dapat dipacu lebih cepat lagi. Sector pertanian, nelayan dan perdagangan hasil produksi petani dapat digalakkan. Bisa jadi irigási serta infrastruktur lain mendapat perhatian melalui pembahasan dengan seluruh jajaran kepentingan yang ada. Dengan ketersediaan kebutuhan produksi desa, sumber daya yang ada dapat dipacu dan diberdayakan secara optimal. Optimalisasi ini akan mendorong perluasan kesempatan kerja serta mengurangi dorongan kelompok usia produktif desa untuk migrasi ke perkotaan atau pusat industri.³

“Rebutan”⁴

Bisa saja rebutan antar-pemangku kepentingan desa terjadi. Masing-masing RW ataupun RT bisa saling berebut dengan menetapkan wilayahnya menjadi patut menerima bantuan tersebut. Mungkin saja akhirnya dana dibagi sesuai dengan ajuan dari para pemangku kepentingan. Hanya saja hal seperti itu tidak selamanya efektif untuk membangun desa secara keseluruhan. Pencocokan usulan dengan lapangan perlu ditempuh dan dijelaskan oleh tim pendamping agar setiap pemangku kepentingan menjadi mengerti.

Untuk keperluan diatas, penyusunan rencana bersama menjadi penting dengan mendudukan semuanya dengan derajat yang sama. Egoisme masing-masing pihak perlu disingkirkan agar pemaksaan kehendak tidak mengedepan. Usulan program dari masing-masing RT/RW dirembukkan dan diwadahi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

¹ Disampaikan dalam forum Depnakertrans di Lembang pada tanggal 11 Januari 2011

² Kepala LP3AN dan Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP-Unpad

³ Lihat Saefullah. Modernisasi Perdesaan

⁴ Lihat Pikiran Rakyat 4/5/10

(LPM). Kehadiran tim menjadi penting untuk memediasi seluruh usulan dan memberikan pertimbangan obyektif, analitis dan praktis. Untuk mensinkronisasikannya, kunjungan lapangan secara bersama dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh yang dimengerti bersama.

Dengan pemahaman yang utuh, rebutan bisa dikurangi. Yang *kalah* dalam usulan programnya tidak sakit hati karena prioritas perlu diberikan kepada pihak lain yang lebih memerlukan. Disamping itu pemahaman dan pengawalan program menjadi lebih lengkap sehingga masalah lapangan dapat ditangani bersama. Bisa saja program penguatan Bumdes ditolak jika setelah diamati dan disurvey perbaikan irigasi menjadi sangat mendesak untuk kemajuan pembangunan ekonomi desa. Mungkin juga jalan desa yang menghubungkan desa dengan jalur utama ekonomi menjadi pilihan desa tertentu agar arus penjualan produksi petani menjadi lebih cepat.

Dengan semangat kebersamaan, egoisme sektoral di masing-masing pemangku kepentingan desa perlu dicairkan. Komunikasi yang dilakukan dengan bantuan tim harus mampu menjadikan seluruh pemangku kepentingan menjadi satu dalam mensukseskan program apapun yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, pemetaan potensi dan permasalahan perlu disusun sebagaimana layaknya sistem yang bertautan satu dengan lainnya. Dengan demikian semua diminta pertimbangan untuk memulai menggarap sub-sistem mana yang paling krusial. Mungkin diskusi menjadi hangat, namun kapasitas tim yang memadai bisa mendorong semua memahami dan mendukungnya.

Penyelarasan

Konsep DP tidak boleh mendorong desa penerima bantuan menjadi kehilangan jati dirinya. Oleh sebab itu, baik juknis maupun tim pendamping perlu memahami dan *concern* terhadap budaya lokal desa setempat. Penyelarasan juknis dengan kondisi setempat perlu diperhatikan terlebih dahulu agar desa tidak dieksploitasi untuk keberhasilan dalam jangka pendek dan merugi dalam jangka panjang. Keharmonisan masyarakat dan keinginannya tetap tinggal di desa menjadi penting dalam merealisasikan programnya. Dengan demikian DP menjadi desa ideal yang mampu mengurangi arus urbanisasi sekaligus memperkuat potensi desa yang ada.

Menggali kekuatan masyarakat desa tidak mudah jika dominasi pemerintah atau pemilik dana lebih besar. Masyarakat akan tiarap dengan kondisi itu. Ujungnya keberhasilan bisa semu yang berujung kerusakan dan pembunuhan potensi masyarakat dalam jangka panjang. Menempatkan masyarakat desa sebagai subyek lebih penting dengan mendengarkan beragam masukan dan keluhannya. Untuk sampai pada suasana tersebut, tempat musyawarah mesti diubah dari yang formal ke informal. Suasana masjid atau riungan warga, misalnya, bisa dimanfaatkan guna meminimalisir tekanan psikologis peserta. Untuk itu forum rembukan ini bisa berjalan fair dan tidak dijadikan media pemaksaan kehendak.

Pelaksanaan musyawarah diatas setidaknya membuka wawasan baru bagi masyarakat desa untuk mengekspresikan kemampuannya. Bisa jadi idenya lebih brilian ketimbang pejabat pemerintah terkait. Dengan demikian, kontribusi masyarakat menjadi lebih besar. Hanya saja diperlukan kecerdikan tim untuk memilih dan meyakinkan agar program yang diterima adalah yang terbaik. Beragamnya ide semakin memperbanyak pilihan dalam pemanfaatan dana program. Disamping itu akan semakin banyak anggota masyarakat yang semakin peduli dengan desanya.

Kesepakatan yang dibuat perlu disosialisasikan secara transparan agar masyarakat mampu memantau dan melakukan koreksi dalam pelaksanaan. Kondisi ini perlu dibangun agar masyarakat merasa diperlakukan manusiawi. Kenyamanan masyarakat terlibat dalam program DP bisa mendorong peningkatan kesehatannya, usahanya serta kesadaran untuk mempertinggi pendidikannya. Dengan demikian, IPM bisa digarap secara otomatis tanpa harus meninggalkan desanya. Oleh sebab itu, DP akan menjadi pendorong masyarakat desa untuk mencintai desa dan kerasan tinggal didesanya ketimbang merantau ke perkotaan.

Perluasan Kesempatan Kerja⁵

Kegagalan membangun desa bisa terkait dengan berita kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) diungkap Pikiran Rakyat (22/11/10). TKW yang umumnya kelompok produktif desa merasa tidak kerasan tinggal di desanya akibat desakan ekonomi. Dampaknya sejumlah perempuan ini mencoba mengadu nasib melalui PJTKI

⁵ Lihat Asep Sumaryana, PR, 23/11/10

untuk memperoleh penghidupan yang "layak" di negeri orang. Oleh sebab itu, kekerasan tampaknya menjadi resiko yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Upaya pemerintah membekali handphone (HP) kepada para tenaga kerja Indonesia (TKI) tampaknya cukup baik sepanjang masa kritis. Namun lebih bagus lagi kalau upaya tersebut didahului upaya pensejahteraan masyarakat di negeri sendiri. Untuk itu seluruh potensi terkait dikerahkan untuk mewujudkan kesempatan kerja agar usia produktif bersemangat bekerja di dalam negeri khususnya di tanah kelahirannya. Perluasan kesempatan kerjamenjadi penting untuk dibangun, termasuk melalui desa peradaban yang sedang digalakkan.

Tatkala upaya internal tidak diusahakan dan usia produktif lebih memilih bekerja diluar wilayah atau diluar negeri, maka kekerasan terhadap TKI tidak dapat dicegah karena TKI memilih untuk setia kepada majikannya ketimbang penyalur dan pemerintahnya. Dampak ini, bisa jadi banyak usia produktif yang menjadi pekerja akan takut melaporkan nasibnya jika terjadi kekerasan terhadap dirinya sepanjang upahnya memadai. Atau demi upah, mungkin bukan hanya TKI yang sulit dipantau nasibnya oleh pemerintah.

Kasus TKI terkait erat dengan upaya mengubah nasib yang tidak dapat dipenuhi jika dirinya berada di tanah air. Dengan demikian, persoalan TKI terkait dengan kesempatan kerja yang tidak memadai di kampung halamannya. Oleh sebab itu, TKI menjadi tulang punggung anggota keluarganya. Bahkan TKI pun diharapkan mampu memperbaiki nasib keluarganya dengan sejumlah uang yang dikirimkan dirinya dari perantauan. Dengan uang kirimannya, TKI mampu membelikan kembali sawah dan ladang yang dijual tatkala kepergian dirinya. Bukan hanya itu, rumah dan biaya sekolah saudaranya pun bisa didanai oleh hasil keringat TKI di negeri orang.

Mengerem TKI tampaknya masih sulit tatkala kesempatan kerja yang memadai masih belum dapat diwujudkan. Tatkala bekerja sebagai petani, maka hasil panen pun sering ditentukan oleh pengijon. Belum lagi lahannya terus tergerus perumahan dan pabrik sehingga selain sering kekurangan air, limbah pun mengalir juga ke sawah. ketika menjadi PKL, pihaknya pun seringkali menjadi incaran Satpol PP. Demikian halnya tatkala membuka warung atau berdagang di pasar, usaha ini pun dikalahkan oleh

supermarket atau mini market yang menjalar sampai ke pinggiran. Begitu menjadi buruh pabrik, upahnya pun sering dibawah UMR.

Persoalan kesempatan kerja tampaknya perlu memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tatkala usaha penduduk tidak berkembang bisa jadi terkait dengan perhatian pihak pemerintah. Pembinaan dari institusi UMKM tampaknya perlu semakin ditingkatkan agar tidak terjadi penyerobotan pasar modern terhadap pasar tradisional, minimarket merampas pelanggan warung, serta pedagang kecil. Demikian halnya, peran kementerian/ dinas pertanian yang tidak boleh bangga dengan kecukupan pangan sementara nasib petaninya tetap tidak berubah.

Kekompakan setiap instansi pemerintah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memperbesar kesempatan kerja bagi warganya. Sebagai sistem, seluruh komponen pemerintah tersebut memutarakan perannya dengan harmonis. Egoisme sektoral yang muncul menunjukkan bahwa sistem tersebut masih acak-acakan dan merusak tujuan yang dicanangkan. Saling menyalahkan atau saling membanggakan diri bukan ciri sistem yang baik karena akhirnya stakeholder merasa dipermainkan kendati sudah menyampaikan beragam keluhan (*voice*) terhadap instansi terkait.

Menghadapi kesulitan hidup yang semakin besar, bisa jadi menjadi TKI adalah *exit* setelah lelah melakukan loyalitas terhadap profesi sebelumnya, baik yang dilakukan orangtua atau saudaranya. Mungkin benar kata Hirshman (1970), jika *exit* terkait dengan *loyalitas* dan *voice*. Selain menjadi pahlawan devisa, menjadi TKI adalah solusi atas kesempatan kerja yang tidak memadai sementara tekanan hidup semakin tinggi. Rendahnya *response* instansi pemerintah turut memengaruhi arus TKI. Penataan internal di pemerintah tampaknya menjadi penting pula ketimbang membekali HP kepada para TKI karena bisa jadi akar masalahnya terletak pada tanggapan atas *voice* masyarakat yang kurang memuaskan.***

Kemiskinan⁶

Jika Bank Dunia (WB) memperkirakan penduduk miskin bertambah 12,4 juta jiwa pada tahun 2010 (PR, 13/12/10), maka keseluruhan kelompok penduduk tersebut akan menjadi 43,4 juta jiwa dari 234 juta penduduk Indonesia. Pertambahan penduduk

⁶ Lihat Asep Sumaryana, PR, 14/12/10

miskin tersebut didasarkan standar penghasilan dibawah Rp 6.000 perhari. Dengan standar ini penduduk tersebut hanya berpenghasilan Rp 180.000 perbulan atau sekitar saperlima dari UMR pekerja pabrik di wilayah kota Bandung.

Membiarkan penduduk miskin seperti itu akan mempercepat lahirnya *loss generation* karena dipastikan kelompok tersebut hanya mampu membeli satu kg beras standar tanpa lauk pauk. Jika yang bersangkutan memiliki dua orang anak, maka kekurangan gizi sangat mungkin dialami oleh keluarga demikian. Gambaran diatas sepatutnya memacu banyak pihak terkait untuk berupaya mempercepat kesejahteraan rakyat tanpa harus diturunkan standar miskinnya agar kelihatan sukses memimpin.

Kesempatan kerja tidak harus diwujudkan dengan penyediaan lapangan kerja. Karena kondisi demikian hanya berarti kewajiban pemerintah untuk senantiasa menyediakan sejumlah lapangan kerja bagi penduduk produktifnya. Dengan cara ini, investasi bisa dibuka seluas mungkin tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang bagi penduduk itu sendiri serta lingkungan yang ada. Akibatnya, kerusakan lingkungan bisa semakin meluas dan sampai kepada sumber-sumber pendapatan penduduk lainnya.

Pertanian yang berdekatan dengan pabrik sering terancam gagal panen karena sumber pengairannya disedot pabrik untuk kemudian dimuntahkan kembali dalam bentuk limbah yang mengalir sungai yang ada di sekitarnya. Dampaknya pertanian menjadi tidak populer dan lebih memilih alih fungsi pekerjaan seperti ojeg atau menjadi bruh pabrik. Lahan pertanian yang tidak mendapat perlindungan ketat dari pemerintah senantiasa beralih fungsi menjadi areal perluasan pabrik atau menjadi bangunan sehingga penduduk lokal yang kehilangan kesempatan kerja jauh lebih banyak ketimbang yang bekerja.

Kesempatan kerja tidak harus identik dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bisa jadi PAD tidak berkembang sementara penduduknya mampu menciptakan pekerjaannya sendiri. Pertanian yang dipercaya digeluti oleh >50% penduduk Indonesia sepatutnya mendapat proteksi agar tidak dilepaskan oleh pelakunya. Benar jika dari sektor ini, pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dana ketimbang dari investor, namun sehatnya kehidupan pertanian bisa meringankan pemerintah untuk tidak membuka lapangan kerja dengan dampak buruk dikemudian hari.

Keberpihakan pemerintah tampaknya perlu dibangun untuk kelompok mayoritas. Penduduk yang masih berupaya mengais rejeki dari bertani, PKL, nelayan atau berdagang di pasar, sepantasnya perlu mendapat perhatian. Pertanian berkembang jika kebutuhan pertanian seperti pupuk, benih dan akses pasar dibuka dengan baiknya infrastruktur yang diperlukan. Demikian halnya ketika PKL menjamur dan diubrak-abrik Satpol PP, bisa jadi solusi kesmiskinan dikalahkan oleh keindahan dan ketertiban kota.

Nelayan tradisional juga sering kalah oleh *pengusaha* nelayan dengan pukat harimaunya sehingga mampu menjaring ikan apapun. dampaknya nelayan tradisional tinggal gigit jari dan menjadi bosan untuk melaut jika hasilnya hanya kerugian. Demikian halnya dengan pasar tradisional yang terus terseret oleh pasar modern tanpa regulasi yang jelas dan menjamin pasar tradisional tetap eksis. (Sumaryana, PR, 4/8/10). Dengan kondisi ini penduduk akan bergeser menjadi penonton dan konsumen dari produk pihak lain tanpa diimbangi dengan produksi yang bisa dilakukan sendiri.

Gambaran ringkas diatas, bukan saja memperluas pengangguran, namun sekaligus menurunkan kualitas hidup penduduk akibat ketidak-sanggupan memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, kehadiran kementerian atau instansi terkait dengan pekerjaan yang terancam punah sangat diperlukan agar, kelompok pekerjaan diatas mau terus mempertahankan pekerjaannya dengan adanya jaminan kesejahteraan jika menekuni pekerjaan tersebut. Menelantarkan kelompok seperti itu, selain menanamkan kecemburuan sosial, bisa juga melahirkan beragam tindakan kriminal atau memperbanyak kelompok pengemis yang bisa berpenghasilan jauh diatas Rp 6.000 perhari.

Pejabat Peduli

Kehadiran pejabat peduli (PP) menjadi penting dalam memberangus kemiskinan. Pejabat seperti ini datang untuk melakukan *public service*. Praktik ini dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan keuntungan bagi dirinya yang perlu dikembalikan menebus biaya kampanye sebelumnya. Bila hal demikian yang terjadi, maka public service pun akan tebang pilih juga. Yang tidak memberikan keuntungan akan ditebangnya karena merugikan. Bisa jadi kelompok miskin dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan kontribusi bagi *pundinya* akan diabaikan untuk *diservice*.

Kehadiran banyak investor bisa jadi sasaran utamanya agar pundiya cepat terisi untuk modal pemilu(kada) berikutnya. Kemungkinan ini bisa saja terjadi tatkala alih fungsi lahan terus berkembang tanpa dibuat regulasi yang jelas, PKL tetap menjadi bulan-bulanan Satpol PP, petani menjadi obyeken tengkulak dan pasar tradisonal dibiarkan terseret oleh pasar modern. Dengan dalih peningkatan pendapatan, kemungkinan keadaan ini bisa menjadi wajar demi mendapatkan dana membangun negara/daerah. Hanya saja dampak berikutnya akan menggelembungkanelompok yang tersisih.

PP berpikiran tidak seperti diatas, pihaknya akan membangun infrastruktur jalan, irigasi agar kebutuhan pengairan bagi petani terpenuhi. Ancaman bagi perusak irigasi atau pencemar airnya terus ditegakkan sehingga pertanian mendapat prioritas untuk dikembangkan. Dengan prioritas ini, berarti pencari di sektor ini akan mendapat perlindungan dari gangguan polusi pabrik sekaligus mengerem keinginannya untuk berpindah ke sektor lain. Perlindungan dari gangguan tengkulak pun terus dilakukan dengan upaya mempertemukan petani dengan konsumennya.

Dengan terbukanya kesempatan kerja, kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan sehingga kemiskinan terus berkurang dengan sendirinya tanpa harus diturunkan standar miskinnya. Berbeda jika orientasinya bukan kearah sana, maka kemiskinan bisa terus berkembang sejalan dengan ketergantungan penduduk pada kehadiran pihak lain tanpa mampu membuka dan mengembangkan potensinya untuk hidup lebih mandiri terbebas dari kemiskinan.***